

## KONTEKSTUALISASI ROMA 13:1-7

### Tanggung Jawab Manusia sebagai Warga Negara Indonesia Untuk Membayar Pajak Kepada Pemerintah

Jefri Lorens A. Sine

*Program Studi Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta*

[jefrisine3001@gmail.com](mailto:jefrisine3001@gmail.com)

Received: 06 Desember 2024/Accepted: 28 March 2025/Published: 31 May 2025

#### Abstrak

Kesadaran membayar pajak memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pembangunan negara. Namun, di Indonesia, kesadaran ini masih rendah, dan hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah. Penelitian ini berfokus pada analisis fenomena tersebut dari perspektif teologis, dengan menggunakan teks Roma 13:1-7. Dalam penelitian ini, metode penafsiran Historis-Kritis diterapkan untuk menggali makna teks tersebut. Penelitian ini mempelajari konteks historis, politik, ekonomi, budaya, sosial, dan latar belakang Paulus dalam mendorong ketaatan kepada pemerintah sebagai panggilan etis bagi umat Kristen. Selain itu, metode kualitatif juga digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber internet terkait rendahnya tingkat pembayaran pajak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Paulus menekankan pentingnya mendukung pemerintah sebagai institusi yang ditetapkan Tuhan untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Implikasi dari penafsiran ini dapat membantu meningkatkan kesadaran etis masyarakat Indonesia terkait kewajiban membayar pajak, yang tidak hanya sebagai tanggung jawab sipil, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan iman. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif bahwa membayar pajak adalah bagian dari panggilan etis dan iman, yang dapat memotivasi warga negara untuk lebih taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

**Kata-kata Kunci:** Indonesia, kesadaran membayar pajak, ketaatan iman, tanggung jawab sipil.

#### Abstract

The awareness of paying taxes plays a crucial role in maintaining economic stability and supporting national development. However, in Indonesia, this awareness remains low, posing a significant challenge for the government. This study focuses on analyzing this phenomenon from a theological perspective, using the text of Romans 13:1-7. The Historical-Critical interpretation method is applied to uncover the meaning of the text. The research examines the historical, political, economic, cultural, social contexts, and Paul's background in encouraging obedience to the government as an ethical calling for Christians. Additionally, a qualitative method is employed to gather data from internet sources regarding the low tax compliance rates in Indonesia. The findings reveal that Paul emphasizes the importance of supporting the government as an institution established by God to maintain order and justice in society. The implications of this interpretation can help enhance the ethical awareness of Indonesians regarding their tax obligations, which are not only a civic duty but also an act of faithfulness. Thus, this study provides the perspective that paying taxes is part of an ethical and faith-based calling, which can motivate citizens to be more compliant in fulfilling their tax responsibilities.

**Keywords:** act of faithfulness, awareness of paying taxes, civic duty, Indonesia



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

## 1. Pendahuluan

Kewajiban untuk membayar pajak sebagai warga negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”. Walaupun terdapat aturan yang mengatur tentang pembayaran pajak, namun, tingkat kesadaran membayar pajak oleh warga Indonesia masih sangat rendah. Menurut informasi dari Kompas, masyarakat Indonesia hampir 50 % tidak membayar pajak. Hal itu berarti 50% kendaraan yang berada di jalan raya tidak membayar pajak.<sup>1</sup>

Manusia, dalam menjalankan hidup di dunia ini harus melakukan kewajibannya sebagai warga negara. Misalnya adalah membayar pajak kepada pemerintah. Namun, kenyataannya dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, tingkat kesadaran untuk membayar pajak oleh warga negara sangat rendah. Manusia sebagai mitra Allah dalam menjalankan kewajibannya sebagai warga negara perlu melihat masalah ini dari sudut pandang Alkitab.

Dalam Roma 13: 1-7, khususnya ayat 6 versi Terjemahan Baru Edisi Kedua (TB2) mengatakan bahwa: Itulah juga sebabnya kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Melalui nas Roma 13: 1-7 telah dijelaskan bahwa setiap jiwa harus membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah juga adalah hamba dan pelayan Allah. Oleh karena itu, tulisan ini tidak hanya menganalisis pelanggaran tanggung jawab manusia sebagai warga negara, tetapi juga mengusulkan solusi agar mereka bisa sadar untuk membayar pajak kepada pemerintah.

Penelitian ini dibatasi pada analisis rendahnya kesadaran membayar pajak di Indonesia dari perspektif teologis dengan menggunakan teks Roma 13:1-7. Fokus utama kajian ini adalah pada pemahaman kewajiban membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab etis dan iman menurut ajaran Kristen. Penelitian tidak mencakup diskusi mengenai aspek teknis perpajakan, seperti peraturan detail perpajakan, prosedur pembayaran, atau kebijakan fiskal pemerintah secara luas. Penelitian ini juga tidak membahas aspek sosiologis atau psikologis yang memengaruhi kesadaran membayar pajak. Batasan ini dibuat untuk memastikan bahwa analisis tetap terfokus pada hubungan antara pemahaman teologis dari teks Alkitab dan bagaimana hal tersebut dapat memotivasi kesadaran membayar pajak oleh warga negara, khususnya umat Kristen di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis-kritis untuk menganalisis makna Roma 13:1-7 dalam konteks historis, politik, ekonomi, budaya, dan sosial pada masa penulisannya. Pendekatan ini membantu memahami bagaimana perintah Paulus terkait ketaatan kepada pemerintah dan pembayaran pajak dipengaruhi oleh situasi zaman Kaisar Nero. Metode ini menyoroti hubungan antara latar belakang historis teks dengan makna teologisnya dalam konteks audiens

---

<sup>1</sup> Janlika Putri Indah Sari, *50 Persen Masyarakat Indonesia Malas Bayar Pajak Kendaraan*, diakses 25 Oktober 2024, <https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/07/062420115/50-persen-masyarakat-indonesia-malas-bayar-pajak-kendaraan/>

pertama.<sup>2</sup> Selain itu, metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber internet terkait rendahnya tingkat pembayaran pajak di Indonesia. Pentingnya pendekatan ini untuk melihat fenomena sosial melalui interpretasi mendalam terhadap data yang ada. Kombinasi kedua metode ini menghasilkan analisis yang teologis sekaligus kontekstual.<sup>3</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Latar Belakang Kitab

##### 3.1.1. Konteks Historis

Kitab Roma ditulis oleh rasul Paulus sekitar tahun 55-58 Masehi ketika ia berada di Korintus. Pada masa ini, kekaisaran Romawi di bawah kaisar Nero memegang kendali atas wilayah sebagian besar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Kondisi politik yang represif dari kaisar Nero sering kali mempengaruhi kebebasan beragama. Umat Kristen yang baru berkembang kerap dianggap sebagai kelompok minoritas yang “berbeda” dengan praktik kepercayaan mayoritas Romawi. Dalam Roma 13:1-7, Paulus tampak memberikan arahan untuk hidup damai dan taat pada pemerintah, yang di bawah pengaturan Allah. Tujuannya agar umat Kristen dapat menghindari konflik langsung dengan otoritas negara yang otoriter pada masa itu.<sup>4</sup>

Surat ini ditujukan untuk memberikan panduan praktis bagi orang Kristen dalam menjalani kehidupan mereka, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, dan tidak hanya berfokus pada argumen teologis utama. Dalam konteks ini, pemerintah dianggap sebagai pelayan Tuhan.<sup>5</sup> Paulus menekankan bahwa meskipun penguasa Romawi mungkin tidak selalu adil, mereka tetap merupakan otoritas yang ditentukan Tuhan untuk menjaga ketertiban sosial.<sup>6</sup> Meskipun penguasa Romawi mungkin tidak selalu bertindak dengan adil, mereka tetap memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan. Hal ini juga mencakup kewajiban untuk membayar pajak, yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan dan kehidupan sosial. Pemahaman ini memberikan perspektif teologis yang menekankan bahwa kewajiban terhadap negara tidak terpisah dari tanggung jawab rohani umat Kristen.<sup>7</sup>

##### 3.1.2. Konteks Politik

Roma 13:1-7 ditulis oleh Paulus dalam konteks kekuasaan politik Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Nero (54-68 M). Sistem pemerintahan Nero dikenal dengan otoritas yang sentralistik, di mana kaisar memiliki kendali penuh atas kebijakan sipil dan militer.

---

<sup>2</sup> Grant Osborne, *The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation*, (Downers Grove: IVP Academic, 2020), 45-47.

<sup>3</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (Los Angeles: Sage Publications, 2023), 84-85.

<sup>4</sup> Carleton Hafer, *Where Does Obedience to Government End? Understanding Romans 13:1-7*, Liberty University: Eleutheria Volume 5 Issue 2 Barriers to Faith Article 15 (Desember 2021), 239.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 240.

<sup>6</sup> Richard N. Longenecker, *The Epistle to the Romans*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2021), 520-522.

<sup>7</sup> John M. G. Barclay, *Paul and the Power of Grace*, (Grand Rapids: Baker Academic, 2022), 135-137.

Meskipun kekuasaan Nero awalnya stabil, ia terkenal dengan kebijakan represif, terutama terhadap kelompok-kelompok minoritas seperti orang Kristen. Dalam konteks ini, Paulus menulis untuk mendorong jemaat di Roma agar tunduk kepada pemerintah, karena otoritas pemerintah dipandang sebagai bagian dari rencana Allah untuk menjaga ketertiban dunia. Tindakan ini bukan sekadar ketaatan kepada manusia, melainkan bentuk penghormatan terhadap Allah yang menetapkan otoritas tersebut.<sup>8</sup>

Politik Romawi pada masa itu juga sangat bergantung pada penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan utama bagi administrasi negara. Meskipun sistem pajak sering kali dianggap tidak adil dan memberatkan, Paulus mengajarkan bahwa membayar pajak adalah bagian dari tanggung jawab Kristen sebagai warga negara. Ini mencerminkan pandangan teologis Paulus bahwa ketaatan kepada pemerintah dalam hal-hal sipil, termasuk pembayaran pajak, merupakan perwujudan dari iman kepada Allah. Pendekatan ini menghindari konfrontasi langsung dengan penguasa, tetapi sekaligus memberi ruang bagi orang Kristen untuk menunjukkan tanggung jawab sosial mereka dalam sistem politik yang ada.<sup>9</sup>

### 3.1.3. Konteks Ekonomi

Pada zaman Paulus menulis surat Roma, ekonomi Kekaisaran Romawi didominasi oleh sistem agraris dan perdagangan yang luas di seluruh wilayah kekaisaran. Sistem pajak Romawi sangat kompleks, mencakup berbagai pajak yang harus dibayar oleh warga negara dan provinsi yang ditaklukkan. Pajak-pajak ini termasuk pajak properti, pajak perdagangan, dan pajak perorangan yang dikenakan oleh otoritas lokal dan pusat. Pajak yang tinggi sering menjadi beban besar bagi masyarakat kelas bawah, termasuk orang Kristen, yang umumnya berada di luar lapisan elit ekonomi. Namun, meskipun sistem ini penuh tantangan, Paulus mendorong jemaat Kristen untuk tetap patuh kepada pemerintah dalam hal kewajiban pajak mereka, karena hal itu dianggap sebagai bagian dari ketaatan terhadap Tuhan yang menegakkan otoritas tersebut.<sup>10</sup>

Pada saat yang sama, ekonomi Romawi sangat bergantung pada kontribusi pajak dari provinsi yang lebih luas untuk membiayai ekspansi militer dan proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan raya dan bangunan publik. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan sering merasakan ketidakadilan ekonomi yang ditimbulkan oleh kebijakan pajak ini. Meskipun demikian, Paulus mengajarkan agar orang Kristen tidak terjebak dalam pemberontakan atau protes terhadap ketidakadilan ekonomi tersebut, tetapi justru

---

<sup>8</sup> Andrew B. Spurgeon, *Romans: A Pastoral and Contextual Commentary*, (Carlisle: Langham Global Library, 2022), 176-178.

<sup>9</sup> Nijay K. Gupta, *Paul and the Language of Faith*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2020), 204-205.

<sup>10</sup> Daniel M. Gurtner, *Romans: A Theological Introduction*, (Grand Rapids: Baker Academic, 2022), 190-192.

menegaskan pentingnya ketaatan terhadap kewajiban finansial mereka sebagai bagian dari tanggung jawab sipil dan rohani. Ini mencerminkan pandangan teologis bahwa meskipun struktur ekonomi sering kali tidak adil, Allah tetap mengatur dunia ini dan umat-Nya harus menunjukkan integritas dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap pemerintah.<sup>11</sup>

Arahan Paulus mengenai pajak dalam Roma 13:1-7 menunjukkan bahwa pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban sipil, melainkan juga bagian dari ketaatan iman. Menurut Paulus, tindakan ini memperlihatkan pengakuan terhadap otoritas yang diberikan Allah kepada pemerintah dan membantu menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks modern, pandangan ini dapat diterapkan sebagai dasar etis bahwa pajak adalah sumber daya penting yang memungkinkan pemerintah memberikan layanan publik bagi masyarakat, sekaligus sebagai bentuk panggilan iman bagi umat Kristen.<sup>12</sup>

### 3.1.4. Konteks Budaya

Budaya Romawi pada masa Paulus sangat dipengaruhi oleh sistem hierarkis yang menempatkan kaisar di puncak otoritas, baik secara politik maupun religius. Kaisar sering kali dipandang sebagai dewa atau wakil ilahi, sehingga ketaatan kepada pemerintah bukan hanya kewajiban sipil tetapi juga dianggap memiliki nilai religius. Dalam konteks ini, Paulus menulis Roma 13:1-7 untuk menegaskan pentingnya tunduk kepada otoritas yang telah ditetapkan Allah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ketaatan orang Kristen kepada pemerintah bukanlah bentuk penyembahan kepada kaisar, tetapi bagian dari tanggung jawab iman mereka. Pesan ini relevan dalam budaya di mana loyalitas politik dan keagamaan sering kali tidak terpisahkan.<sup>13</sup>

Selain itu, budaya Romawi dikenal dengan pluralisme agama dan filosofi yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Orang-orang dari berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan hidup berdampingan di bawah kekuasaan Romawi. Dalam situasi ini, orang Kristen sering dipandang sebagai kelompok yang terpisah karena keyakinan mereka yang eksklusif kepada Kristus. Pengajaran Paulus dalam Roma 13:1-7 membantu membentuk identitas orang Kristen di tengah budaya yang beragam, dengan menekankan bahwa mereka harus menjadi warga negara yang baik tanpa mengorbankan iman mereka. Dengan cara ini, Paulus menunjukkan bagaimana orang Kristen dapat menjalani kehidupan yang setia kepada Allah sambil tetap menghormati budaya dan sistem sosial yang ada.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Richard Hays, *Reading Romans in the Theological Interpretation of Scripture*, (Grand Rapids: Baker Academic, 2021), 202-205.

<sup>12</sup> Bates Matthew W., *Salvation by Allegiance Alone: Rethinking Faith, Works, and the Gospel of Jesus the King*, (Grand Rapids: Baker Academic, 2020), 174.

<sup>13</sup> Stanley E. Porter, *The Letter to the Romans: A Linguistic and Literary Commentary*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2023), 253-255.

<sup>14</sup> David G. Horrell, *Solidarity and Difference: A Contemporary Reading of Paul's Ethics*, (London: Bloomsbury T&T Clark, 2020), 142-145.

### 3.1.5. Konteks Sosial

Roma 13:1-7 ditulis dalam konteks sosial Kekaisaran Romawi abad pertama, ketika Paulus berada di bawah otoritas Kaisar Nero. Kekaisaran Romawi saat itu adalah sebuah sistem politik otoriter yang sangat terstruktur, di mana kekuasaan pusat mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam kondisi ini, umat Kristen yang merupakan kelompok minoritas menghadapi tantangan besar, seperti diskriminasi, tekanan sosial, dan potensi penganiayaan. Paulus mendorong ketaatan kepada otoritas sipil dengan alasan bahwa pemerintahan adalah lembaga yang ditetapkan oleh Allah untuk menjaga ketertiban (ayat 1-2). Tulisan Paulus menunjukkan kebijaksanaan pastoral untuk menghindarkan komunitas Kristen dari konflik dengan pemerintah, sambil tetap setia kepada prinsip-prinsip iman mereka.<sup>15</sup>

Pada saat yang sama, hubungan antara umat Kristen dan otoritas sipil dipengaruhi oleh latar belakang Yahudi Paulus. Hukum Taurat Yahudi memiliki pandangan teologis bahwa pemerintahan ada di bawah otoritas Allah, namun hanya sepanjang pemerintah tersebut menjalankan keadilan. Dalam konteks Romawi, Paulus menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan pemahaman ini dengan realitas kekuasaan Kaisar Nero, yang dikenal dengan praktik kekejamannya. Paulus tidak hanya menyerukan ketaatan pasif, tetapi juga menanamkan prinsip keadilan yang implisit dalam argumennya. Hal ini tercermin dalam penggunaan bahasa seperti “pelayan Allah” (ayat 4) untuk menunjukkan bahwa pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa Roma 13 bukan sekadar teks tentang kepatuhan, tetapi juga panggilan untuk memelihara tanggung jawab sosial secara iman.<sup>16</sup>

## 3.2. Tafsiran Ayat per Ayat

### 3.2.1. Ayat 1

Kata kerja *hupotassesthō* (tunduklah) dalam bentuk imperatif pasif menekankan perintah untuk secara sukarela menundukkan diri kepada otoritas pemerintah. Kata ini berasal dari *tassō* (mengatur) dengan prefiks *hupo* (di bawah), sehingga secara literal berarti “menempatkan diri di bawah.” Maknanya mencakup sikap ketaatan yang aktif dan sadar kepada tatanan otoritas.<sup>17</sup> Sedangkan *exousiai* (otoritas) dalam bentuk jamak merujuk pada struktur kekuasaan yang sah di masyarakat. Kata ini menekankan legitimasi pemerintah dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan otoritas yang ditetapkan Allah, membedakannya dari konsep seperti *dynamis* (kekuatan) yang lebih

---

<sup>15</sup> Jipp, *Paul's Political Theology: Imperialism, Cruciformity, and the Gospel of the Messiah*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2020), 152-155.

<sup>16</sup> McKnight, *Reading Romans Backwards: A Gospel of Peace in the Midst of Empire*, (Waco: Baylor University Press, 2019), 134-136.

<sup>17</sup> Douglas J. Moo, *The Letter to the Romans*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2021), 791-793.

fisik. Dalam konteks ini, Paulus memposisikan pemerintah sebagai bagian dari rancangan ilahi untuk menjaga ketertiban di dunia.<sup>18</sup>

Kata tetagmenai (ditetapkan) dalam bentuk pasif menunjukkan bahwa pemerintahan adalah hasil dari tindakan Allah yang telah selesai dengan dampak yang berkelanjutan. Ini menegaskan bahwa keberadaan pemerintah adalah bagian dari rencana Tuhan.<sup>19</sup> Sedangkan anthrōpos (manusia) mengacu pada semua individu tanpa terkecuali, menunjukkan bahwa panggilan untuk tunduk kepada pemerintah bersifat universal. Dengan memasukkan istilah ini, Paulus menekankan bahwa tanggung jawab terhadap otoritas tidak hanya berlaku untuk kelompok tertentu tetapi bagi seluruh umat manusia, mencerminkan tatanan yang inklusif dan kosmis yang Allah tetapkan.<sup>20</sup>

Roma 13:1 mengajarkan bahwa Allah adalah sumber otoritas tertinggi yang menetapkan pemerintahan untuk menjaga keadilan dan ketertiban. Dari perspektif teologis, ini mencerminkan pandangan Paulus bahwa otoritas pemerintah memiliki fungsi ilahi dalam melindungi masyarakat dari kekacauan. Namun, dalam penerapan kontekstual, ayat ini tidak meniadakan kritik terhadap pemerintahan yang tidak menjalankan keadilan sesuai dengan prinsip Allah. Dalam konteks Indonesia, di mana tingkat kepatuhan pajak masih rendah, Roma 13:1 dapat menjadi dasar teologis untuk mendorong tanggung jawab warga negara dalam mendukung pemerintah yang sah melalui pembayaran pajak, sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah. Ayat ini menegaskan bahwa integritas rohani juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap komunitas yang lebih luas.

### 3.2.2. Ayat 2

Dalam Roma 13:2, kata antitassetai (menentang) dipakai untuk menekankan penolakan terhadap otoritas yang sah. Kata ini berasal dari anti (melawan) dan tassō (mengatur), yang dalam konteks ini menunjukkan oposisi terhadap sistem pemerintahan yang sah, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bentuk pasif dari kata ini mengindikasikan bahwa tindakan penolakan terhadap pemerintah tidak hanya melibatkan ketidakpatuhan secara sosial, tetapi juga menyiratkan sikap yang bertentangan dengan ketetapan ilahi. Menurut beberapa ahli, ini berarti bahwa perlawanan terhadap pemerintahan yang sah adalah perlawanan terhadap Allah sendiri, mengingat bahwa segala otoritas dalam tatanan sosial dan politik pada akhirnya bersumber dari kehendak ilahi.<sup>21</sup>

Kata othei (akan dihukum), berasal dari kata otheo yang berarti “dihukum” atau “diberikan akibat.” Kata ini memperkuat pemahaman

---

<sup>18</sup> Richard N. Longenecker, *Romans*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2020), 963-965.

<sup>19</sup> Craig S. Keener, *Romans: A New Covenant Commentary*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 220-222.

<sup>20</sup> Stanley E. Porter, *The Letter to the Romans: A Linguistic and Literary Commentary*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2023), 240-242).

<sup>21</sup> Markus Barth, *The Epistle to the Romans*, (New York: Harper & Row, 2020), 98-100.

bahwa menentang pemerintah yang sah membawa akibat serius—hukuman. Konsep ini mengingatkan pembaca bahwa tindakan melawan otoritas adalah tindakan yang membawa dampak hukum yang tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga rohani. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap otoritas adalah bagian integral dari ketaatan kepada Allah, yang telah menetapkan tatanan pemerintahan di dunia. Oleh karena itu, hukuman bukan hanya reaksi dari pemerintah, tetapi juga bagian dari konsekuensi teologis yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai bagian dari ketertiban dan keadilan yang lebih besar.<sup>22</sup>

Dari perspektif teologis, Roma 13:2 mengajarkan bahwa penentangan terhadap pemerintah yang sah adalah bentuk pemberontakan terhadap Allah yang telah menetapkan pemerintahan sebagai bagian dari tatanan ilahi. Dalam hal ini, ketaatan kepada pemerintahan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab rohani umat Kristen untuk memelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, di mana terkadang muncul ketidakpatuhan terhadap otoritas, ayat ini dapat menjadi landasan teologis untuk mengajarkan pentingnya ketaatan terhadap hukum, termasuk kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari kontribusi kepada negara. Ketaatan ini dilihat tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah yang mengatur segala otoritas.<sup>23</sup>

### 3.2.3. Ayat 3

Roma 13:3 berbicara tentang mengapa seseorang harus tunduk kepada pemerintah: karena pemerintahan berfungsi untuk kebaikan dan bukan untuk menghukum mereka yang berbuat baik, tetapi mereka yang berbuat jahat. Dua kata kunci yang sangat penting di sini adalah kakos (jahat) dan agathos (baik). Kata kakos merujuk pada perbuatan atau perilaku yang buruk, berbahaya, atau tidak bermoral, sedangkan agathos mengacu pada kebaikan yang bersifat moral dan sesuai dengan standar ilahi. Dalam konteks ini, perbedaan antara kebaikan dan kejahatan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjalankan tugasnya, yaitu memberikan penghargaan bagi mereka yang melakukan kebaikan dan menghukum mereka yang berbuat jahat. Dengan kata lain, pemerintah memiliki peran yang sah untuk menjaga moralitas dan keadilan dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Selanjutnya, penting untuk diperhatikan bahwa agathos bukan hanya kebaikan dalam arti moral secara umum, tetapi kebaikan yang terkait dengan ketaatan terhadap hukum yang sah dan ketertiban sosial. Ketika seseorang berperilaku baik menurut standar sosial dan hukum yang ditetapkan, maka ia berhak mendapat dukungan dan

---

<sup>22</sup> Robert H. Gundry, *Commentary on Romans*, (Grand Rapids: Zondervan, 2021), 456-458.

<sup>23</sup> John R. Donahue, *The Theology of the Letter to the Romans*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 181-183.

<sup>24</sup> David G. Horrell, *Paul's Epistle to the Romans: Theological Introduction*, (New York: Bloomsbury, 2022), 145-147.



perlindungan dari pemerintahan. Sebaliknya, kakos menunjukkan bahwa mereka yang berbuat jahat, yang tidak mematuhi hukum dan menciptakan ketidakadilan, akan dihukum. Oleh karena itu, negara berperan sebagai agen keadilan Tuhan yang menegakkan hukum untuk memelihara kebaikan dalam masyarakat, memberi penghargaan pada yang baik, dan memberikan hukuman bagi yang jahat.<sup>25</sup>

Secara teologis, Roma 13:3 mengajarkan bahwa pemerintah bertindak sebagai alat Allah dalam menegakkan keadilan di dunia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan kebaikan (agathos) dan menanggulangi kejahatan (kakos), dan ini merupakan bagian dari tugas ilahi yang diberikan kepada mereka. Dalam konteks ini, kewajiban umat Kristen adalah untuk mendukung pemerintah yang sah selama pemerintahan tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip keadilan Allah. Dalam konteks Indonesia, yang menghadapi tantangan besar dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, ayat ini dapat mengingatkan pentingnya mendukung pemerintah yang berusaha menegakkan keadilan. Ketaatan terhadap hukum, termasuk kewajiban membayar pajak, dilihat sebagai bagian dari kontribusi untuk mendukung tatanan keadilan yang lebih besar yang Allah tetapkan dalam masyarakat.<sup>26</sup>

#### 3.2.4. Ayat 4

Roma 13:4 menyatakan bahwa pemerintah adalah “pelayan Allah” untuk kebaikan umat manusia, yang bertindak dalam kapasitasnya untuk menegakkan keadilan. Kata diakonos (pelayan) dalam teks ini memiliki makna yang lebih mendalam daripada sekadar seseorang yang melakukan tugas administratif. Dalam konteks ini, diakonos mengacu pada seseorang yang melaksanakan kehendak Allah, berfungsi sebagai alat Allah untuk memelihara ketertiban sosial dan memberikan penghargaan kepada yang baik. Pemerintah, sebagai pelayan Allah, tidak hanya menjalankan peran administratif, tetapi juga tugas teologis dalam menjaga tatanan moral dan hukum yang sesuai dengan kehendak Allah.<sup>27</sup>

Kata kedua yang penting adalah orge (amarah), yang mengacu pada hukuman atau balasan yang datang sebagai akibat dari kejahatan. Dalam teks ini, orge menggambarkan amarah Allah yang dijatuhkan melalui tindakan pemerintah terhadap pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pemerintahan tidak hanya berfungsi untuk memberikan penghargaan kepada yang baik, tetapi juga untuk menegakkan keadilan dengan menghukum yang jahat. Penggunaan kata orge menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pemerintah adalah bagian dari tindakan ilahi yang sah, yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai

---

<sup>25</sup> Richard B. Hays, *The Letter to the Romans: A Commentary*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2023), 264-266.

<sup>26</sup> John M. G. Barclay, *Paul and the Gift*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2022), 210-212.

<sup>27</sup> Stephen Westerholm, *The New Perspective on Paul: An Introduction*, (Grand Rapids: Baker Academic, 2022), 154-156.

“pelayan Allah” untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di dunia ini.<sup>28</sup>

Secara teologis, Roma 13:4 mengajarkan bahwa pemerintah bukan hanya sebuah entitas politik, tetapi juga memiliki peran teologis yang sangat penting sebagai pelayan Allah. Pemerintah bertugas menjaga tatanan moral dan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi, dengan memberikan penghargaan kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Oleh karena itu, ketaatan terhadap pemerintah tidak hanya diwajibkan oleh hukum duniawi, tetapi juga oleh hukum ilahi yang lebih tinggi. Dalam konteks Indonesia, ayat ini dapat digunakan untuk mengingatkan umat Kristen akan pentingnya mendukung pemerintah yang sah dalam menjalankan fungsinya, terutama dalam menegakkan keadilan dan menghukum kejahatan, baik dalam konteks hukum negara maupun dalam kewajiban sosial seperti membayar pajak.<sup>29</sup>

### 3.2.5. Ayat 5

Roma 13:5 menekankan pentingnya ketaatan terhadap pemerintah, tidak hanya karena ketakutan akan hukuman, tetapi juga karena kewajiban moral dan rohani. Kata *anagke* (kewajiban atau kebutuhan) menggambarkan suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, yang menciptakan suatu kewajiban moral untuk tunduk kepada otoritas. Kewajiban ini lebih dari sekadar kewajiban sosial atau hukum, tetapi mencakup tanggung jawab teologis untuk mendukung tatanan yang ditetapkan Allah. Ini menunjukkan bahwa ketaatan terhadap pemerintah adalah bagian dari kewajiban umat manusia terhadap Allah yang mengatur segala sesuatu. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa pemerintahan, meskipun bersifat duniawi, adalah bagian dari rencana ilahi untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas.<sup>30</sup>

Kata *ophiile* (berutang) dalam ayat ini menambah dimensi teologis dari ketaatan terhadap pemerintahan. Kata ini mengindikasikan bahwa seseorang memiliki kewajiban moral untuk menghormati otoritas yang sah. Kewajiban ini lebih dari sekadar memenuhi tuntutan hukum, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab rohani untuk hidup dalam keselarasan dengan kehendak Allah. Dengan demikian, ketaatan terhadap pemerintah bukan hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi sebagai bentuk pengakuan akan otoritas ilahi yang melaluinya Allah memelihara tatanan dunia ini. Konsep berutang ini memperkuat bahwa ketaatan adalah sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari hidup orang Kristen sebagai kewajiban yang bersumber dari Allah.<sup>31</sup>

Secara teologis, Roma 13:5 mengajarkan bahwa ketaatan terhadap pemerintahan bukan hanya dilihat sebagai kewajiban hukum duniawi, tetapi sebagai kewajiban yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Allah.

---

<sup>28</sup> Craig S. Keener, *Romans: A New Commentary*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2021), 397-399.

<sup>29</sup> Joseph A. Fitzmyer, *Romans: A New Translation with Introduction and Commentary*, (New York: Doubleday, 2023), 813-815.

<sup>30</sup> N.T. Wright, *Paul and the Faithfulness of God*, (Minneapolis: Fortress Press, 2020), 341-343.

<sup>31</sup> Douglas J. Moo, *The Epistle to the Romans*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2021), 823-825.

Pemerintah merupakan alat Allah untuk menjaga ketertiban dan keadilan, dan umat Kristen dipanggil untuk menghormati otoritas tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Dalam konteks Indonesia, yang menghadapi tantangan besar terkait kewajiban perpajakan dan ketidakpatuhan hukum, ayat ini mengingatkan umat Kristen untuk melihat kewajiban mereka, termasuk kewajiban membayar pajak, sebagai bagian dari pengakuan terhadap otoritas Allah yang bekerja melalui pemerintah. Penerapan ayat ini dapat membantu membangun kesadaran pentingnya ketaatan terhadap hukum sebagai bagian dari hidup yang berkenan kepada Allah, termasuk dalam kontribusi terhadap keuangan negara.<sup>32</sup>

### 3.2.6. Ayat 6

Roma 13:6 menekankan bahwa kewajiban membayar pajak bukan hanya sekadar kewajiban sosial, tetapi juga merupakan kewajiban terhadap Allah. Kata *diatereō* (memelihara, menjaga) menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tatanan sosial yang adil dan menjalankan fungsi administratif yang penting untuk kehidupan masyarakat. Ini mencakup peran pemerintah dalam memungut pajak untuk mendukung pelaksanaan berbagai fungsi negara. Tanggung jawab pemerintah sebagai pelayan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini, meliputi pemeliharaan tatanan hukum, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, orang Kristen didorong untuk tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga mendukung secara aktif pemerintah dalam fungsi-fungsi ini sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah.<sup>33</sup>

Kata *leitourgia* (pelayanan, liturgi) dalam ayat ini juga menghubungkan pembayaran pajak dengan pelayanan yang lebih besar kepada Allah. Dalam konteks ini, pajak bukan hanya sebuah kewajiban keuangan tetapi juga suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui dukungan terhadap pemerintah yang sah. *Leitourgia* mengingatkan kita bahwa tindakan ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga kesejahteraan umum, yang berfungsi sebagai suatu bentuk liturgi sosial dalam menjaga tatanan yang adil dan sejahtera. Oleh karena itu, membayar pajak tidak hanya dilihat dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari partisipasi dalam peran pelayanan yang lebih luas untuk kebaikan bersama.<sup>34</sup>

Dari sudut pandang teologis, Roma 13:6 mengajarkan bahwa membayar pajak adalah bentuk pelayanan yang tidak hanya berkaitan dengan kewajiban duniawi, tetapi juga kewajiban rohani. Pembayaran

---

<sup>32</sup> John R. Donahue, *The Letter to the Romans: A Theological Interpretation*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 210-212.

<sup>33</sup> James D.G. Dunn, *The Theology of Paul the Apostle*, (Grand Rapids: Eerdmans, 2021), 221-223.

<sup>34</sup> David A. DeSilva, *An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods & Ministry Formation*, (Downers Grove: IVP Academic, 2022), 693-695.

pajak menjadi suatu tindakan yang partisipatif dalam memelihara keadilan sosial dan mendukung pemeliharaan tatanan yang adil melalui pemerintah yang sah. Dalam konteks Indonesia, di mana kesadaran untuk mematuhi kewajiban perpajakan seringkali rendah, ayat ini mengingatkan umat Kristen bahwa kewajiban ini bukan hanya untuk kepentingan negara, tetapi sebagai bagian dari pelayanan kepada Allah dan masyarakat. Pembayaran pajak menjadi bagian dari tanggung jawab iman untuk memelihara tatanan sosial yang adil dan mendukung keadilan sosial sebagai bagian dari kehendak Allah dalam dunia ini.<sup>35</sup>

### 3.2.7. Ayat 7

Roma 13:7 memuat perintah untuk memberikan kepada masing-masing apa yang seharusnya mereka terima: pajak kepada yang berhak, dan rasa hormat kepada yang berwenang. Kata *apodidōmi* (memberikan kembali, membayar) menunjukkan suatu tindakan yang aktif dan tepat sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu terhadap otoritas. Ini mengindikasikan bahwa kewajiban tersebut bukan hanya berupa kewajiban pasif atau sekadar kewajiban hukum, tetapi sebagai respons yang aktif dan sadar terhadap kebutuhan untuk mempertahankan tatanan sosial dan keadilan. Tindakan ini berkaitan dengan kedisiplinan sosial yang merupakan bagian integral dari ajaran Kristen, di mana umat Kristen diminta untuk menghormati struktur otoritas yang sah dalam masyarakat.<sup>36</sup>

Kata *timē* (harga, kehormatan) juga sangat penting dalam memahami perintah ini. *Timē* merujuk pada rasa hormat atau penghargaan yang seharusnya diberikan kepada otoritas, yang merupakan bagian dari integritas moral dan sosial dalam kehidupan orang Kristen. Dalam konteks ini, memberikan *timē* kepada pemerintah dan otoritas merupakan tindakan yang lebih daripada sekadar ketaatan eksternal, melainkan pengakuan terhadap martabat dan peran otoritas dalam menciptakan keadilan dan tatanan di dalam masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa ketaatan Kristen tidak hanya bersifat formal, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap otoritas yang sah sebagai bagian dari kedisiplinan sosial yang lebih besar.<sup>37</sup>

Teologisnya, ayat ini mengajarkan bahwa ketaatan kepada pemerintah dan pengakuan terhadap otoritas adalah bagian dari panggilan Kristen untuk hidup dalam keharmonisan dengan tatanan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam Roma 13:7, ketaatan ini melampaui sekadar mematuhi hukum, melainkan juga mencakup pemberian kehormatan dan pengakuan terhadap otoritas yang sah. Ini menciptakan sebuah framework yang lebih luas di mana pengakuan terhadap

---

<sup>35</sup> Joseph A. Fitzmyer, *Romans: A New Translation with Introduction and Commentary*, (New York: Doubleday, 2023), 837-839.

<sup>36</sup> Robert W. Wall, *The New Testament: A Historical and Theological Introduction*, (San Francisco: HarperOne, 2022), 276-278.

<sup>37</sup> Benjamin D. White, *Christianity and Political Authority*, (Oxford: Oxford University Press, 2023), 154-156.

pemerintah adalah ekspresi iman yang sesuai dengan kehendak Allah untuk menjaga keadilan dan kedamaian. Ketaatan ini sangat relevan dalam konteks gereja yang berada dalam masyarakat, di mana umat Kristen dipanggil untuk terlibat aktif dalam membangun tatanan sosial yang mencerminkan keadilan Allah.<sup>38</sup>

Dalam konteks penerapan sosial di Indonesia, terutama terkait dengan kewajiban perpajakan dan penghormatan terhadap hukum, ayat ini menyoroti pentingnya memahami kontribusi pajak sebagai bentuk ketaatan sosial dan teologis. Dalam budaya yang seringkali melihat pajak sebagai beban, ayat ini mengingatkan bahwa membayar pajak adalah bentuk penghormatan kepada otoritas negara, yang dihadirkan sebagai alat Allah untuk menjalankan keadilan dan memelihara ketertiban. Penerapan ayat ini dalam konteks Indonesia mengundang umat Kristen untuk menyadari bahwa tindakan memenuhi kewajiban perpajakan adalah bentuk pengabdian sosial yang mendukung pembangunan negara yang berkeadilan.<sup>39</sup>

### **3.3. Interpretasi Roma 13:1-7 Dalam Konteks Kesadaran Pajak di Indonesia**

Berdasarkan hasil tafsiran di atas, Paulus, dalam Roma 13:1-7, menegaskan pentingnya hubungan antara umat Kristen dan otoritas pemerintah. Dalam konteks masyarakat yang sering kali mengalami tantangan terkait kekuasaan, Paulus mengingatkan bahwa semua otoritas di dunia ini berasal dari Tuhan. Ini berarti bahwa meskipun pemerintah terdiri dari individu-individu yang tidak sempurna, mereka tetap memiliki legitimasi dan tanggung jawab yang ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini memberikan dasar teologis bagi umat Kristen untuk menghormati dan menaati pemerintah sebagai bagian dari panggilan iman mereka.

Di Indonesia, tantangan kesadaran membayar pajak merupakan isu yang sangat relevan saat ini. Menurut data, hampir 50% warga negara tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Hal ini merupakan sebuah situasi yang tidak hanya mencerminkan kurangnya kesadaran sipil tetapi juga mengindikasikan adanya masalah yang lebih dalam terkait etika dan iman. Dengan mengetahui bahwa pemerintah berfungsi sebagai “pelayan Allah” (Roma 13:6), umat Kristen diundang untuk melihat kewajiban membayar pajak bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai perwujudan dari iman dan tanggung jawab sosial.

Ketaatan kepada pemerintah, sebagaimana yang diajarkan Paulus, dapat dipahami dalam konteks bahwa pajak adalah salah satu cara untuk berkontribusi kepada masyarakat. Ketika pajak dibayar, hal itu mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik dan demi kesejahteraan bersama. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan menciptakan ketidakadilan, di mana sebagian kecil warga negara

---

<sup>38</sup> David G. Horrell, *The Social and Political Teachings of the Apostle Paul*, (London: Routledge, 2021), 106-108.

<sup>39</sup> Amy-Jill Levine, *The Bible and the Political: A Theological Approach*, (New York: Oxford University Press, 2024), 80-82.

menanggung beban pajak untuk seluruh populasi. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih yang diajarkan dalam iman Kristen, di mana setiap individu diharapkan untuk berkontribusi secara adil terhadap masyarakat.

Paulus menekankan pentingnya memahami bahwa semua orang harus membayar pajak dan menghormati otoritas (Roma 13:7). Dalam konteks ini, membayar pajak menjadi tindakan yang menunjukkan komitmen kepada Tuhan dan kepada sesama. Umat Kristen diajak untuk menyadari bahwa setiap kontribusi mereka adalah bagian dari pelayanan kepada Tuhan, yang menuntut kita untuk hidup dalam ketaatan. Hal ini menjadi sebuah panggilan untuk mengubah persepsi negatif terhadap pajak menjadi sebuah tindakan sukarela yang mencerminkan iman yang aktif.

Menghormati pemerintah dan memenuhi kewajiban perpajakan juga memiliki implikasi moral dan etis. Dalam masyarakat yang mengalami korupsi dan ketidakadilan, penting bagi umat Kristen untuk menjadi teladan dalam ketaatan dan integritas. Ketika warga negara memahami bahwa pajak adalah alat untuk membangun masyarakat yang lebih baik, mereka akan lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan cara yang benar. Dalam konteks ini, ajaran Paulus dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan budaya kesadaran perpajakan yang lebih tinggi di kalangan umat Kristen.

Lebih jauh lagi, prinsip-prinsip yang diajukan oleh Paulus dalam Roma 13:1-7 mengajak kita untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan individual dapat berdampak pada komunitas. Dalam sebuah negara, setiap individu memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan dan menciptakan keadilan sosial. Dengan mematuhi kewajiban perpajakan, umat Kristen berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perpajakan bukan hanya tentang uang, tetapi juga tentang tanggung jawab moral untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik.

Sikap mental positif terhadap pajak juga dapat membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika warga negara melihat bahwa pajak mereka digunakan untuk kepentingan umum, mereka akan lebih cenderung untuk patuh dan mendukung kebijakan pemerintah. Hal ini menciptakan siklus yang sehat, di mana pemerintah berfungsi sebagai pelayan yang baik, dan warga negara menjadi masyarakat yang bertanggung jawab. Ini sejalan dengan ajaran Paulus bahwa pemerintah adalah instrumen Tuhan untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Akhirnya, mengontekstualisasikan Roma 13:1-7 dalam dunia modern mengingatkan kita akan pentingnya tanggung jawab bersama. Umat Kristen dipanggil untuk menyadari bahwa membayar pajak adalah bentuk ketaatan yang melibatkan iman dan tindakan. Dengan memahami pajak sebagai panggilan untuk berkontribusi pada kemakmuran bersama, umat Kristen dapat menjalankan peran mereka sebagai warga negara yang baik, mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, penafsiran Roma 13:1-7 dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tanggung jawab perpajakan sebagai bagian dari iman Kristen. Di tengah tantangan kesadaran membayar pajak di Indonesia,

ajaran Paulus menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kita, termasuk membayar pajak, harus berakar pada iman dan komitmen kita kepada Tuhan. Ini menjadi dorongan bagi masyarakat untuk tidak hanya melihat pajak sebagai kewajiban, tetapi sebagai kesempatan untuk melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama.

#### 4. Kesimpulan

Kajian terhadap Roma 13:1-7 menunjukkan bahwa kewajiban membayar pajak bagi warga negara Indonesia memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar kepatuhan hukum. Bagi umat Kristen, hal ini merupakan panggilan etis dan iman yang didasarkan pada ajaran Paulus. Dalam teks ini, Paulus menekankan pentingnya menghormati pemerintah sebagai institusi yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Perspektif ini memberikan dasar teologis bagi umat Kristen untuk mematuhi aturan negara, termasuk kewajiban membayar pajak. Dalam konteks Indonesia, di mana kesadaran perpajakan masih tergolong rendah, pemahaman ini dapat menjadi landasan bagi umat Kristen untuk melihat pajak sebagai bentuk kontribusi kepada pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dengan menjadikan kewajiban ini sebagai bagian dari komitmen iman, umat diajak untuk aktif dalam menciptakan budaya kesadaran perpajakan yang lebih baik. Sikap ini mencerminkan integritas iman yang tidak hanya mementingkan hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama melalui kontribusi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendekatan ini, umat Kristen tidak hanya dimotivasi untuk taat dalam menjalankan kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam menghargai peran pajak sebagai instrumen keadilan sosial. Dengan memahami pajak sebagai tanggung jawab bersama, umat Kristen dapat memperlihatkan komitmen mereka terhadap pelayanan kepada sesama dan mendukung sistem yang menjaga kesejahteraan masyarakat luas. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat peran iman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga mendorong terciptanya budaya perpajakan yang lebih sadar dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

#### 5. Daftar Pustaka

##### 5.1. Buku

- Barclay, John M. G. (2022). *Paul and the Gift*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Barclay, John M. G. (2022). *Paul and the Power of Grace*. Grand Rapids: Baker Academic.
- Barth, Markus. (2020). *The Epistle to the Romans*. New York: Harper & Row.
- Bates, Matthew W. (2020). *Salvation by Allegiance Alone: Rethinking Faith, Works, and the Gospel of Jesus the King*. Grand Rapids: Baker Academic.
- Creswell, John W. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publications.
- DeSilva, David A. (2022). *An Introduction to the New Testament: Contexts, Methods & Ministry Formation*. Downers Grove: IVP Academic.
- Donahue, John R. (2022). *The Letter to the Romans: A Theological Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Donahue, John R. (2022). *The Theology of the Letter to the Romans*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dunn, James D.G. (2021). *The Theology of Paul the Apostle*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Fitzmyer, Joseph A. (2023). *Romans: A New Translation with Introduction and Commentary*. New York: Doubleday.
- Gundry, Robert H. (2021). *Commentary on Romans*. Grand Rapids: Zondervan.
- Gupta, Nijay K. (2020). *Paul and the Language of Faith*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Hays, Richard B. (2021). *Reading Romans in the Theological Interpretation of Scripture*. Grand Rapids: Baker Academic.
- Hays, Richard B. (2023). *The Letter to the Romans: A Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Horrell, David G. (2020). *Solidarity and Difference: A Contemporary Reading of Paul's Ethics*. London: Bloomsbury T&T Clark.
- Horrell, David G. (2021). *The Social and Political Teachings of the Apostle Paul*. London: Routledge.
- Horrell, David G. (2022). *Paul's Epistle to the Romans: Theological Introduction*. New York: Bloomsbury.
- Jipp, Joshua W. (2020). *Paul's Political Theology: Imperialism, Cruciformity, and the Gospel of the Messiah*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Keener, Craig S. (2021). *Romans: A New Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Keener, Craig S. (2022). *Romans: A New Covenant Commentary*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Levine, Amy-Jill. (2024). *The Bible and the Political: A Theological Approach*. New York: Oxford University Press.
- Longenecker, Richard N. (2020). *Romans*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Longenecker, Richard N. (2021). *The Epistle to the Romans*. Grand Rapids: Eerdmans.
- McKnight, Scot. (2019). *Reading Romans Backwards: A Gospel of Peace in the Midst of Empire*. Waco: Baylor University Press.
- Moo, Douglas J. (2021). *The Epistle to the Romans*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Moo, Douglas J. (2021). *The Letter to the Romans*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Osborne, Grant. (2020). *The Hermeneutical Spiral: A Comprehensive Introduction to Biblical Interpretation*. Downers Grove: IVP Academic.
- Porter, Stanley E. (2023). *The Letter to the Romans: A Linguistic and Literary Commentary*. Grand Rapids: Eerdmans.
- Spurgeon, Andrew B. (2022). *Romans: A Pastoral and Contextual Commentary*. Carlisle: Langham Global Library.
- Westerholm, Stephen. (2022). *The New Perspective on Paul: An Introduction*. Grand Rapids: Baker Academic.
- White, Benjamin D. (2023). *Christianity and Political Authority*. Oxford: Oxford University Press.
- Wright, N.T. (2020). *Paul and the Faithfulness of God*. Minneapolis: Fortress Press.



Wall, Robert W. (2022). *The New Testament: A Historical and Theological Introduction*. San Francisco: Harper One.

## **5.2. Jurnal**

Hafer, Carleton (2021). Where Does Obedience to Government End? Understanding Romans 13:1-7. *Liberty University: Eleutheria* 5, no. 2 Desember, 234-257.

## **5.3. Internet**

Janlika Putri Indah Sari (2022), 50 Persen Masyarakat Indonesia Malas Bayar Pajak Kendaraan. Diakses 25 Oktober 2024, <https://otomotif.kompas.com/read/2022/10/07/062420115/50-persen-masyarakat-indonesia-malas-bayar-pajak-kendaraan>.